

LOKAKARYA
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Bogor, 30 Oktober 1993

LOK KKN - IX

PRAKTEK KERJA PROFESI (PKP)
SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF KKN

Oleh :

Fakultas Teknologi Pertanian IPB



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
1993

PRAKTEK KERJA PROFESI (PKP)
SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF KKN ¹⁾

Oleh :

Bambang Pramudya ²⁾

A. LATAR BELAKANG

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai Perguruan Tinggi pertanian terkemuka di Indonesia mempunyai falsafah dasar untuk menjadi pusat pengembangan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 melalui pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi: yaitu pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Berdasarkan falsafah tersebut IPB melalui "statuta"-nya yang diresmikan oleh Mendikbud tertanggal 18 November 1992 (SK 0435/0/1992) menegaskan secara jelas tujuan pendidikannya, yaitu :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menemukan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

1) Makalah disampaikan pada Lokakarya KKN IPB, di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Tanggal 30 Oktober 1993;

2) Pembantu Dekan I Fateta IPB.

Untuk melaksanakan salah satu bentuk darma pengabdian pada masyarakat, IPB seperti halnya perguruan tinggi lain, melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan telah berlangsung sejak tahun 1976. Selama kurun waktu 17 tahun, telah terjadi banyak perubahan baik dalam pola pelaksanaan, orientasi program, dan status akademik KKN.

Perkembangan masyarakat dan tuntutan pembangunan disatu pihak, serta perkembangan IPB dan iptek dipihak lain menuntut adanya orientasi kembali pola pelaksanaan pengabdian pada masyarakat melalui ajang KKN.

Beberapa pertanyaan mendasar sebagaimana dilontarkan oleh LPM-IPB dalam rangka lokakarya KKN-IPB perlu mendapatkan perhatian dan pemecahan secara bijak dan tepat sasaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah :

- a. Apakah KKN IPB selama ini telah mencapai tujuannya terutama relevansinya dalam "menopang" kemampuan keilmuan para mahasiswa ?
- b. Apakah KKN IPB bermanfaat bagi masyarakat luas, dan sejauh mana ?
- c. Karena keunikannya, bagaimana porsi (relatif) masing-masing darma perguruan tinggi di dalam KKN yang dinilai layak ?
- d. Apakah penyelenggara KKN IPB perlu dilakukan secara sentralisasi (LPM) atau desentralisasi (fakultas), dan bagaimana sistem koordinasinya ?

Selain itu barangkali perlu dipikirkan dan direnungkan, serta dicanangkan dalam bentuk program nyata - tentang kiprah IPB dalam rangka mengantisipasi dan berperan dalam memobilisasi potensi desa dalam rangka pengembangan agroindustri. Hal ini tantangan bagi IPB sebagaimana harapan Presiden Soeharto dalam pembukaan Dies IPB ke 30, bulan September 1993 yang lalu. Kalau IPB pernah sukses dalam mengembangkan gagasan dan pelaksanaan BIMAS - tahun 1960-1970, kini seharusnya IPB juga tertantang untuk menyukseskan "program pengembangan agroindustri di

pedesaan". Pola kegiatan pengabdian pada masyarakat secara profesional untuk pengembangan agroindustri, terutama di daerah pedesaan, adalah tepat untuk dipikirkan pada lokakarya saat ini.

B. KKN, ANTARA CITA DAN REALITA

Falsafah dan landasan pemikiran KKN bagi mahasiswa Perguruan Tinggi adalah bagus, serta idealis. Tetapi dalam pelaksanaan dan penjabaran konsep KKN di lapang, serta berbagai kendala teknis menyebabkan cita ideal KKN tersebut sulit diterapkan.

Tak dapat dipungkiri manfaat KKN bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, maupun perguruan tinggi. Meskipun dalam petunjuk teknis pelaksanaan KKN-IPB tercantum sederetan sasaran yang ingin dicapai, manfaat nyata yang dapat diperoleh melalui kegiatan KKN-IPB adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, lebih mengenalkan akan lingkungan desa beserta permasalahan yang ada.
2. Bagi masyarakat, lebih mengenal informasi dan masalah-masalah pembangunan, termasuk pengenalan teknik atau cara-cara baru untuk memecahkan masalah.
3. Bagi pemerintah daerah, mendapat masukan tentang permasalahan di wilayahnya yang barangkali secara birokratis mungkin tidak akan diperoleh.
4. Bagi perguruan tinggi, lebih mengenal masalah pembangunan pertanian yang terjadi di pedesaan sehingga diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengabdian pendidikan.

Walaupun demikian, pelaksanaan KKN-IPB seperti pola sekarang ini mempunyai beberapa kelemahan mendasar.

Meskipun tidak dilakukan studi khusus, dari telaahan, pengamatan dan keterlibatan langsung KKN selama ini, Fateta IPB merangkum beberapa butir masalah (khususnya) bagi mahasiswa Fateta, yang perlu dipikirkan pemecahan dan perbaikan lebih serius dan berkesinambungan. Masalah tersebut adalah :

1. Makna interdisipliner banyak ditafsirkan bahwa semua mahasiswa IPB tak pandang dari jurusan/fakultas mana harus mampu menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan program apa saja. Keharusan melaksanakan kegiatan tersebut mengakibatkan mahasiswa kurang atau tidak dapat melaksanakan secara baik dan profesional.
2. Sebagian besar program KKN banyak memerlukan landasan ilmu sosiologi pedesaan, penyuluhan yang kuat, sehingga pembekalan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan KKN kurang dapat memberikan "bekal kemampuan" bagi mahasiswa diluar disiplin tersebut.
3. Tuntutan daerah lokasi KKN terlalu umum, komplek yang pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan selama KKN berlangsung. Malah timbul kesan pada akhirnya mahasiswa KKN terjerumus pada kegiatan "rutin" KKN antara lain pembinaan olah raga, kesenian, pengajian, perpustakaan, administrasi desa, penyuluhan - suatu kegiatan yang tidak harus dikerjakan oleh mahasiswa .
4. Disisi lain hasil positif KKN, antara lain peningkatan dinamika dan partisipasi masyarakat, pengembangan industri kecil/ rumah tangga/pedesaan, tidak selalu dapat ditangani secara berkelanjutan oleh program-program pasca KKN.
5. Beberapa kecenderungan di atas berakibat bahwa untuk mahasiswa bidang-bidang ilmu tertentu, pelaksanaan program KKN tidak akan dapat dilaksanakan secara baik. Pengabdian masyarakat sesuai dengan amalan ilmu yang dipunyai sulit diharapkan tercapai.

Selain hal-hal tersebut, barangkali perlu disepakati oleh IPB, pengertian masyarakat selain kaitannya dengan KKN. Dalam panduan KKN-IPB dan pelaksanaannya masyarakat diartikan sebagai pedesaan, sedangkan dalam pedoman pelaksanaan KKN di perguruan tinggi yang diterbitkan oleh DP3M, Dikti (1993) masyarakat mempunyai makna lebih luas yakni masyarakat di luar kampus. Demikian pula makna pengabdian dikonotasikan pengabdian pada masyarakat pedesaan. Bagaimana kita menafsirkan kegiatan seorang mahasiswa

yang memberi penyuluhan tentang tatacara pengeringan kopra kepada sekelompok petani kelapa, sedangkan mahasiswa tersebut melakukan praktek kerja atau lapang di industri minyak makan. Petani kelapa tersebut adalah pemasok bahan bagi industri minyak tersebut. Dengan batasan diatas, jelas mahasiswa tersebut tidak melaksanakan KKN.

C. TUGAS AKHIR MAHASISWA FATETA

Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) sebagai salah satu fakultas di IPB mempunyai ruang lingkup program institusional yang integral yang mencakup pendidikan penelitian dan kerja sama profesional dalam upaya pembangunan sumber daya manusia serta pengembangan teknologi pertanian berwahana agroindustri (mencakup industri pengolahan hasil pertanian, bio industri, industri alat dan mesin pertanian serta industri jasa pertanian) yang selaras dengan sistem pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan program pendidikan di Fateta, sampai tahun ajaran 1992/1993 mahasiswa selain mendapat pendidikan melalui kuliah, praktika, kunjungan lapangan/-industri, setelah melewati jenjang tertentu, melakukan tiga kegiatan tugas akhir, berupa :

- Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan
- Praktek Lapang (PL)
- Penelitian Masalah Khusus (MK)

PL berbobot 3 SKS merupakan kegiatan intrakurikuler dan berstatus wajib bagi mahasiswa dilaksanakan selama satu bulan pada awal semester 8. Tujuan PL adalah mengenalkan dan melatih mahasiswa menangani masalah yang terjadi di industri pertanian (jasa dan manufakturing) maupun unit/sektor pendukungnya. Dari tujuan PL tersebut diharapkan terjadi pematangan mahasiswa dalam ilmu yang dipelajari dan berlatih dalam penerapannya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di industri. Meskipun demikian, pada kenyataannya latihan PL selama satu bulan di industri/lapang jauh dari harapan. Evaluasi dan pengamatan kegiatan PL menunjukkan beberapa ciri kegiatan :

- Mahasiswa lebih banyak bersifat pasif dan berfungsi sebagai "pengamat". Kalaupun terdapat porsi kegiatan bekerja (dengan tugas dan kewajiban sebagai tenaga kerja tempat ber PL), porsi waktunya terlalu sedikit.
- Waktu satu bulan terlalu pendek untuk melatih mahasiswa agar setelah lulus menjadi sarjana yang "siap latih".
- Jarang terdapat penugasan khusus untuk memecahkan masalah di lapang/industri, baik dari Dosen Pembimbing atau pihak industri karena waktu PL yang pendek tersebut.
- Sebagai akibatnya laporan PL terlalu umum dan teoritis.

Kecenderungan tersebut menimbulkan pemikiran Fateta, IPB untuk meninjau dan menata kembali pelaksanaan PL disesuaikan dengan kondisi industri, sehingga terbuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja atau magang. Tuntutan tersebut penting untuk mewujudkan pelaksanaan "link & match" antara pendidikan dan dunia kerja/dunia usaha/industri sebagaimana dicanangkan oleh Depdikbud.

Penelitian masalah khusus (MK) adalah wajib bagi mahasiswa Fateta dengan bobot kredit 6 SKS dan dilakukan selama 2 - 4 bulan. MK dapat berupa penelitian laboratorium, pengkajian lapang, studi kasus atau rancang bangun alat/ proses, pemodelan sistem dalam tema yang berkaitan dengan industri pertanian. Hasil MK dituliskan dalam bentuk skripsi yang harus dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa pada sidang ujian sarjana - dihadapan Dosen Penguji. MK dimaksudkan untuk melatih mahasiswa menerapkan kaidah-kaidah ilmiah dalam memecahkan masalah melalui tahapan dan metodologi ilmiah tertentu. Dengan demikian diharapkan setelah menjadi sarjana TP, mereka terbiasa untuk berpikir dan memecahkan masalah berdasarkan pola ilmiah (scientific pattern). Bagi lulusan TP yang berminat menekuni profesi ilmuwan atau pengembang teknologi, MK merupakan latihan awal. Berdasarkan falsafah tersebut, Fateta tetap mempertahankan pola MK tersebut sebagaimana yang dilakukan sampai sekarang. Perbaikan dan cakupan lingkup MK akan senantiasa dilakukan sesuai dengan kemajuan iptek.

Berlainan dengan PL dan MK, KKN merupakan kegiatan akademik yang lebih banyak memasukan unsur pengabdian pada masyarakat dan dilakukan secara antar disiplin ilmu. Dikti (1993) menjabarkan KKN sebagai suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah - masalah pembangunan yang dihadapi.

Pada tahun 1987-1989 Fateta IPB pernah menerapkan program KKN-Profesi, yakni kegiatan praktek lapang yang digabung dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disekeliling industri tempat PL. Program tersebut dimaksudkan untuk menggabungkan kegiatan PL dan KKN.

D. PRAKTEK KERJA PROFESI - SEBUAH ALTERNATIF

Berdasarkan kenyataan, bahwa pada pelaksanaan KKN seperti pola yang berlaku sekarang, misi Fateta-IPB tak secara optimal dapat dilaksanakan, pada beberapa waktu lalu (Mei 1993), timbul pemikiran untuk menerapkan program pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fateta tidak melalui wahana KKN, melainkan dalam bentuk lain yang mencerminkan ke profesionalan, dan pada jangka waktu lebih pendek yaitu 5 minggu. Kegiatan ini bernama Praktek Kerja Profesi (PKP).

Perkembangan tuntutan pembangunan, kualifikasi lulusan, serta misi dan tanggung jawab IPB untuk berkiprah dalam pengembangan agroindustri pada PJP II, menggulirkan gagasan PKP diatas untuk dikembangkan dengan fokus sasaran pengembangan agroindustri, dan dengan ruang lingkup PKP yang lebih luas.

1. Pengertian PKP

PKP adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk belajar, bekerja, dan mengabdikan pada masyarakat di luar kampus dan secara langsung menangani masalah-masalah yang dihadapi masyarakat tersebut secara profesional.

Pengertian masyarakat dalam kegiatan ini adalah agroindustri (manufakturing dan jasa), koperasi, atau penduduk di suatu daerah yang mempunyai aktivitas di agribisnis atau agroindustri.

2. Tujuan dan Sasaran PKP

Tujuan pelaksanaan program Praktek Kerja Profesi untuk mahasiswa Fateta IPB adalah :

- a. Mengembangkan pengetahuan, sikap dan kemampuan profesi mahasiswa melalui penerapan ilmu, latihan kerja dan pengamatan teknik-teknik yang diterapkan di lapang dalam bidang keahliannya.
- b. Meningkatkan kemampuan bekerja secara profesional melalui kegiatan magang industri dan memecahkan masalah yang dihadapi di lapang/agroindustri.
- c. Memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang pembangunan dan pengembangan agroindustri.
- d. Mendekatkan Perguruan Tinggi kepada masyarakat dan dunia kerja, agar pendidikan tinggi tanggap terhadap tuntutan pembangunan dan pengembangan agroindustri serta perkembangan IPTEK.

Sasaran PKP selain memberikan kesempatan melatih keterampilan profesi di lapang/masyarakat/dunia kerja bagi mahasiswa, juga berfungsi sebagai pemberi masukan baik bagi Perguruan Tinggi untuk memperoleh informasi kelayakan penerapan iptek dan tuntutan masyarakat/dunia kerja terhadap kualifikasi lulusan yang diharapkan. Bagi masyarakat, kegiatan PKP diharapkan secara terus menerus dan berkesinambungan dapat meningkatkan potensi sumber daya yang ada menjadi kegiatan agroindustri yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan.

PKP dilaksanakan sebagai kegiatan intrakurikuler dan wajib dilakukan oleh mahasiswa selama dua bulan (50 hari kerja, 5-6 jam/hari) dengan bobot kredit sebesar 5 SKS. Bobot kredit ini diperhitungkan dalam nilai mutu rata-rata mahasiswa.

Pada beberapa jurusan dan lokasi tertentu, PKP dapat dilan-

jutkan lebih lama menjadi kegiatan magang. Selain itu bagi jurusan yang mempunyai program praktek lapang, kegiatan ini termasuk di dalam cakupan PKP.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, Fateta mengusulkan dua alternatif kegiatan PKP yang dapat dijadikan oleh IPB sebagai wahana bimbingan dan pengabdian agroindustri pada masyarakat.

Alternatif tersebut adalah :

Pertama, IPB merombak pola KKN sekarang ini menjadi PKP yang khusus difokuskan untuk pengembangan agroindustri.

Dalam pelaksanaannya perlu ditentukan wilayah yang dapat dijadikan "pilot-project" kegiatan ini. "Wilayah" inilah yang secara terus-menerus dan terprogram dijadikan ajang "PKP". Pola penyelenggaraan BIMAS dengan berbagai modifikasi dapat diterapkan untuk "PKP-Agroindustri".

Untuk penyelenggaraan "PKP-Agroindustri", jelas dibutuhkan persiapan yang relatif lebih lama dan matang, sehingga dalam waktu dekat jelas pola ini belum akan dapat dijalankan. Tetapi penancangan untuk 2-3 tahun yang akan datang bukan hal yang mustahil. Sebagaimana halnya Bimas, dalam pelaksanaan PKP, IPB perlu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama Dep. Pertanian, Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan, Dep. Koperasi, Bank Indonesia, dan Dep. Dalam Negeri.

Kedua, IPB memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Fakultas untuk menentukan "pola" dan ciri PKP yang dapat digunakan sebagai wahana pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan agroindustri. Fateta IPB berniat untuk menerapkan kegiatan ini dalam jangka panjang, karena diperlukan persiapan dan penggarapan yang matang dan serius, antara lain menjalin kerjasama dengan Departemen terkait.

Dalam jangka pendek, Fateta mengusulkan tahapan peralihan yaitu PKP yang sebagian jumlah mahasiswa menjalani di pedesaan akan

menjalani PKP di kawasan industri akan melakukan kegiatan PL plus pengabdian yang dapat dilakukan di masyarakat sekitar industri atau di dalam industri, atau pihak/industri yang terkait.

Batasan, ruang lingkup dan tatacara pelaksanaan teknis PKP disajikan secara rinci dalam "Pedoman PKP-Fateta, IPB".

Dalam penyelenggaraannya, untuk alternatif pertama agaknya pola sentralisasi akan lebih baik, sedangkan untuk alternatif kedua dapat dilakukan pola "campuran" baik LPM dan Fakultas terlibat dalam kegiatan tersebut.